



GUBERNUR DIY: KELOLA SAMPAH MANDIRI

Tanpa Paksaan, Kadang Tak Jalan

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X meminta kepada kabupaten/kota di DIY untuk mengurangi produksi sampah di level hulu dan mengelolanya secara mandiri. Jadi adanya kebijakan penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Piyungan saat ini diharapkan bisa menggerakkan kabupaten/kota untuk aktif mengolah sampah di daerahnya masing-masing. Hal itu perlu dilakukan untuk mengurangi beban TPA Regional Piyungan yang telah mengalami kelebihan kapasitas.



KR-Riyana Ekawati
Sultan Hamengku Buwono X

* Bersambung hal 7 kol 5

Tanpa Sambungan hal 1

"Sekarang ini masalahnya kalau tidak dipaksa, kabupaten/kota itu kan tidak jalan. Jadi memang ditutup, dipaksa karena sudah kelebihan kapasitas," kata Sultan HB X di Kepatihan, Yogyakarta, Senin (31/7).

Sultan mengatakan, sebetulnya sudah sejak 2 tahun lalu dirinya memberikan izin Tanah Kas Desa (TKD) digunakan untuk tempat pembuangan sampah atau pengelolaan sampah, tetapi hal itu tidak dilaksanakan. Kabupaten/kota baru melaksanakan pengelolaan sampah saat TPA Regional Piyungan ditutup. Tapi sekarang mulai jalan karena mereka sudah memiliki tempat pengolahan sampah sendiri.

"Sebetulnya kami sudah memberikan izin Tanah Kas Desa untuk membuang sampah, sambil berproses *ning ora digawe* (tapi tidak dibuat), sudah 2 tahun yang lalu. Baru 4 bulan lalu begitu kami kasih surat *tak tutup, grobyagan*. Walaupun saat ini mereka akhirnya mau bergerak dan sudah punya (tempat pengolahan sampah) sendiri-sendiri. Kalau tidak dipaksa *rada* (agak) otoriter ternyata tidak mau. Masalahnya hanya di situ saja," terang Sultan.

Sultan mengungkapkan, berdasarkan regulasi yang ada, Pemkab/Pemkot-lah yang memiliki tugas di wilayahnya, sedangkan provinsi hanya memfasilitasi. Tapi yang terjadi di DIY, seluruh sampah dari tiga kabupaten/kota langsung dibuang di TPA Regional Piyungan tanpa adanya pemilahan dan pengolahan di tingkat dua. "Memang bunyi Undang Undang, sampah itu wewenang kabupaten kita kan memfasilitasi saja. Bukannya tidak mau," ungkap Sultan.

Gubernur DIY meminta kabupaten/kota untuk se-

gera mengurangi produksi sampah di level hulu. Kabupaten Bantul dan Sleman harus mengelola sampah secara mandiri di masing-masing daerah. Karena usia TPA Regional Piyungan saat ini sudah semakin singkat. Jadi meski sudah mulai dibuka, tapi masih terbatas dan hanya mampu menampung sampah dari Kota Yogyakarta. Pembuangan sampah ke kawasan tersebut pun saat ini dibatasi 100-200 ton saja sehari. Sedangkan Bantul dan Sleman dikelola secara mandiri oleh masing-masing wilayah.

(Ria)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005